
Masalah Disintegrasi Bangsa

I Ketut Astawa¹, Alya Rafeyfa Asyla², Amanda Putri³, Caecillia Claudia Agatha⁴,
Damar Nurcahyo⁵, Isnaini Julianti⁶, Srimurti Eka Octaviani⁷

Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: sarastawa@fh.unsika.ac.id

Article History:

Received: 01 November 2024

Revised: 20 November 2024

Accepted: 22 November 2024

Keywords: *National Disintegration, Unity, National Identity, Social Conflict, State Stability.*

Abstract: *National disintegration is a phenomenon of a country's division into separate parts due to various factors that threaten the integrity and unity of the nation. This phenomenon often arises as a response to the dissatisfaction of certain groups, such as attempts to secede by regions or communities that feel marginalized from the development and government process. In addition, socio-political problems such as injustice, corruption, and weak leadership also worsen the condition, eroding the solidity of a unitary state. The impact of national disintegration is not only limited to political and economic aspects, but also extends to social and cultural aspects. National identity can be eroded, relations between citizens deteriorate, and the sense of solidarity and togetherness fades. Concretely, disintegration can trigger open conflict, destruction of infrastructure, an increase in the number of internally displaced people, and the loss of national stability and cohesion. Therefore, efforts to prevent disintegration through strengthening unity, equitable development, and conflict management are very important.*

PENDAHULUAN

Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait Perpecahan atau disintegrasi bangsa merupakan ancaman nyata yang dapat terjadi di berbagai negara, terutama yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama. Di banyak kasus, disintegrasi kerap dipicu oleh politisasi terhadap perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan dasar dalam pembentukan negara. Politisasi ini dapat memperburuk kesenjangan sosial, menciptakan ketidakpuasan, dan memicu konflik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah, Indonesia berpotensi besar mengalami konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Salah satu konflik yang sering muncul dan memiliki dampak luas terhadap persatuan bangsa adalah konflik agraria. Konflik ini umumnya berakar pada ketimpangan kepemilikan lahan, perebutan sumber daya alam, serta kebijakan pemerintah yang timpang tindih dan tidak merata. Dalam sejarah Indonesia, konflik agraria telah menjadi salah satu masalah yang terus

berulang, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu gerakan separatisme atau perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara konflik agraria dan disintegrasi bangsa serta menganalisis peran konflik agraria dalam sistem keamanan nasional Indonesia. Secara khusus, artikel ini berusaha memahami sejauh mana konflik agraria dapat memperburuk ancaman disintegrasi dan bagaimana konflik tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor lain dalam konteks keamanan nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik agraria memiliki potensi besar untuk memicu disintegrasi bangsa. Konflik ini sering kali berujung pada terjadinya perpecahan sosial, penurunan legitimasi pemerintah, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Peluang terjadinya disintegrasi akibat konflik agraria sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu subjek dan objek konflik, serta kebijakan pemerintah. Subjek konflik melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti petani, perusahaan swasta, hingga pemerintah daerah, sementara objek konflik umumnya adalah lahan atau sumber daya alam. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, tumpang tindih, atau tidak berpihak pada masyarakat kecil menjadi faktor utama pemicu konflik.

Selain itu, konflik agraria sering kali diperburuk oleh isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang dapat memperdalam segregasi sosial dan memperburuk hubungan antarkelompok masyarakat. Tidak jarang, konflik ini berujung pada tindakan anarkis, seperti perusakan properti, pembakaran lahan, hingga bentrokan fisik yang merugikan banyak pihak. Dalam konteks keamanan nasional, konflik agraria dapat dikategorikan sebagai ancaman strategis, karena menyangkut beberapa komponen penting negara. Pertama, subjek dan objek konflik merupakan bagian dari komponen fisik negara yang harus dijaga, seperti penduduk dan sumber daya alam. Kedua, konflik ini menyoroti kelemahan dalam komponen institusional negara, yaitu pemerintah dan sistem hukum. Ketiga, konflik yang melibatkan isu SARA dapat mengancam harmoni sosial yang menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa. Keempat, aksi anarkis yang sering kali muncul sebagai respons terhadap konflik agraria mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang disediakan oleh negara.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dampaknya, konflik agraria perlu mendapatkan perhatian serius dalam konteks kebijakan nasional. Pemerintah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengelola konflik agraria, termasuk melalui reformasi kebijakan agraria, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan penguatan mekanisme penyelesaian konflik. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencegah disintegrasi bangsa, tetapi juga untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara tertulis dengan menggunakan metode kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel sebelumnya. Menurut Sugiyono (2018:213), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat tertentu dan digunakan untuk meneliti kondisi alamiah atau eksperimen, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada pemaknaan.

Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan deskripsi dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji, baik yang bersifat ilmiah maupun hasil rekayasa manusia. Pendekatan ini juga menekankan pada kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia, yang dipicu oleh ketimpangan kepemilikan lahan dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, berpotensi memicu disintegrasi bangsa. Konflik ini dapat memperburuk ketegangan sosial, terutama ketika diwarnai oleh isu SARA, yang memperdalam segregasi sosial. Selain itu, konflik agraria menurunkan legitimasi pemerintah, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat, dan membuka peluang bagi gerakan separatis.

Dalam konteks keamanan nasional, konflik agraria merupakan ancaman strategis karena melibatkan komponen penting negara, seperti masyarakat dan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan agraria, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme penyelesaian konflik untuk mencegah disintegrasi dan memperkuat stabilitas nasional.

Disintegrasi secara harfiah adalah terpecahnya suatu negara menjadi bagian-bagian yang terpisah. Fenomena tersebut, meski dipandang sebagai akibat dari gerakan separatis, sebenarnya bermula dari ketidakpuasan mendasar terhadap perlakuan pemerintah terhadap daerah atau kelompok minoritas. Permasalahan seperti otonomi daerah, keadilan sosial dan pembangunan yang tidak seimbang bisa menjadi pemicu gerakan ini. Lingkungan politik Indonesia saat ini penuh dengan konflik dan konflik menimbulkan kecenderungan disintegrasi. Gelombang reformasi menciptakan realitas baru, dengan munculnya aliansi politik dan ideologi serta tuntutan otonomi dari daerah-daerah di luar Jawa. Konflik etnis dan bentrokan antar kelompok merupakan permasalahan yang semakin berkembang.

Bangsa dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal atau mendiami suatu wilayah, memiliki identitas yang sama, berbicara dalam bahasa yang sama dan banyak lagi. Kelompok masyarakat ini berkumpul karena menyadari bahwa mereka bersatu karena mempunyai cita-cita yang sama dan telah menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun beberapa penyebab disintegrasi bangsa, yaitu sebagai berikut:

Faktor Internal, Penyebab internal berkaitan dengan kualitas individu dalam suatu negara. Hal ini sering muncul akibat salah penafsiran atau pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, yang berujung pada perilaku intoleran, sikap etnosentrisme, hingga penggunaan bahasa yang kurang sopan.

Faktor Kultural, faktor ini berhubungan dengan nilai, mentalitas, dan perilaku masyarakat. Sistem budaya yang kurang menekankan keharmonisan sosial dapat memunculkan kelompok yang tidak saling menghargai budaya lain, hingga melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Faktor Struktural, disintegrasi juga dapat dipicu oleh struktur kekuasaan yang tidak adil, seperti ketimpangan ekonomi, meningkatnya pelanggaran HAM, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kebijakan pusat yang tidak merata terhadap daerah.

Perbedaan Ideologi, setiap negara memiliki ideologi resmi yang harus dijunjung oleh warganya. Jika ada ideologi lain yang bertentangan, seperti Marxisme atau Komunisme di Indonesia yang menganut Pancasila, hal ini dapat mengancam persatuan bangsa.

Ketimpangan Demografi, ketidakseimbangan dalam distribusi penduduk dan kebutuhan

dapat memicu persaingan antarwarga. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Iklm Politik yang Tidak Sehat, politik yang dipertainkan untuk kepentingan pribadi dapat memicu perpecahan, seperti demonstrasi dan konflik sosial yang sering terjadi akibat manipulasi politik.

Rendahnya Tingkat Toleransi, toleransi terhadap perbedaan adalah pilar penting dalam kehidupan berbangsa. Ketika masyarakat gagal menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan kondisi sosial, potensi perpecahan menjadi semakin besar.

Terhambatnya Ekonomi, kesenjangan ekonomi yang meningkat, disertai dengan tingginya tingkat pengangguran, dapat memicu ketimpangan sosial dan kriminalitas. Kondisi ini pada akhirnya memperburuk kohesi sosial dalam masyarakat.

Ancaman Disintegrasi Bangsa Pasca Reformasi

Pasca kemerdekaan, khususnya setelah Reformasi, ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia semakin nyata. Ancaman ini muncul dalam berbagai bentuk tindakan anarkis yang terjadi di berbagai wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Citra Indonesia sebagai bangsa yang dikenal ramah, berbudaya, dan penuh kesantunan mulai memudar akibat derasnya arus reformasi. Reformasi, meski membawa perubahan positif dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial, juga melahirkan tantangan baru berupa konflik berbasis primordial. Konflik-konflik ini sering kali memiliki penyebab yang tak terduga, yang kemudian memberikan wajah baru bagi NKRI dalam hal stabilitas sosial dan politik.

Salah satu penyebab utama konflik adalah pandangan bahwa pluralitas dalam masyarakat Indonesia, yang meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merupakan sumber utama ketegangan. Padahal, pluralitas adalah ciri khas bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan ini sering dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu konflik yang mengancam keutuhan bangsa. Ancaman disintegrasi pasca Reformasi dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama.

Pertama, konflik separatis yang berujung pada kekerasan, seperti lepasnya Timor Timur dari NKRI setelah jajak pendapat pada tahun 1999. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia, di mana upaya mempertahankan wilayah gagal dilakukan.

Kedua, konflik komunal berskala besar, baik antaragama, intraagama, maupun antaretnis. Beberapa contoh konflik ini terjadi di Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Konflik-konflik ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan kerugian material yang besar serta memicu perpindahan penduduk secara massal.

Ketiga, kekerasan dalam skala kota yang berlangsung selama beberapa hari, seperti kerusuhan besar yang terjadi pada Mei 1998. Peristiwa ini tidak hanya menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu, tetapi juga menunjukkan rentannya stabilitas sosial di tengah krisis ekonomi dan politik.

Keempat, kekerasan sosial akibat main hakim sendiri, seperti pertikaian antar desa atau antar kelompok masyarakat. Kekerasan jenis ini sering kali dipicu oleh konflik kecil, seperti sengketa lahan atau masalah adat, yang kemudian berkembang menjadi konflik besar karena kurangnya upaya mediasi yang efektif.

Kelima, kekerasan terkait dengan aksi terorisme, seperti yang terjadi di Bali dan Jakarta. Aksi terorisme ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional.

Untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, pemerintah dituntut untuk memiliki

kemampuan analisis yang tajam terhadap pengaruh lingkungan strategis. Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, dalam mengatasi separatisme dan ancaman dari kelompok bersenjata, pemerintah harus bertindak cepat dan tegas. Kelompok-kelompok seperti RMS (Republik Maluku Selatan) dan PKI (Partai Komunis Indonesia), meskipun berbeda dalam ideologi dan tujuan, sama-sama berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, untuk mengatasi masalah ini.

Kedua, pemerintah harus menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, dengan beragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan bangsa, juga berpotensi menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Faktor keberagaman ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat upaya rekonsiliasi, dialog antar kelompok, dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah konflik komunal.

Dampak dari konflik-konflik ini sangat besar. Gelombang pengungsian besar-besaran, kerugian harta benda, korban jiwa, serta kerusakan lingkungan dan infrastruktur menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Selain itu, konflik-konflik ini juga mengganggu stabilitas nasional dan keamanan masyarakat di daerah konflik. Oleh karena itu, menjaga keutuhan NKRI melalui pengelolaan konflik yang efektif adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.

Upaya Penyelesaian Masalah Disintegrasi Bangsa Pasca Kemerdekaan

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh bangsa dan negara agar dapat bangkit kembali adalah:

Pertama, Populerkan dan ajarkan kembali Pancasila serta UUD 1945 kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, Revitalisasi GBHN yang pernah ada sebagai pedoman dalam membangun negara.

Ketiga, Para tokoh dan elite bangsa harus memberikan contoh baik dan menjadi teladan bagi masyarakat, hindari konflik dan cacik hanya demi kepentingan kelompok atau partai politik.

Keempat, Angkat dan lestarikan budaya luhur bangsa, seperti budaya saling menghormati.

KESIMPULAN

Runtuhnya negara merupakan ancaman serius yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan politik, konflik etnis, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak hubungan antar bangsa. Pasca Reformasi, konflik sosial, politik, dan ekonomi semakin meningkat, berpotensi memecah belah bangsa, dan ancaman disintegrasi semakin nyata. Penyebab utama keruntuhan negara antara lain kesenjangan distribusi sumber daya, kesenjangan ekonomi, rendahnya toleransi masyarakat, dan ketidakmampuan pemerintah merespons ketegangan sosial secara efektif. Mengatasi ancaman disintegrasi memerlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mendukung proses rekonsiliasi antargolongan, serta menjaga keadilan dan persatuan di seluruh Indonesia. Upaya mengatasi permasalahan keruntuhan negara harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah saja, namun juga tokoh

masyarakat, tokoh agama, dan seluruh individu. Dengan mempertahankan keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan, dan menghindari manipulasi politik berbasis SARA, Indonesia bisa tetap bersatu dan kohesif.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa. (2024, Februari 12). *Pengertian Disintegrasi, Penyebab Dan Contohnya*. Retrieved From Fahum.Umsu.Ac.Id: <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Pengertian-Disintegrasi-Penyebab-Dan-Contohnya/>
- Yusuf, M. A. (N.D.). *Disintegrasi Bangsa: Pengertian, Sebab, Dan Contoh Kasusnya*. Retrieved From Gramedia.Com: <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Disintegrasi-Bangsa/>
- Matondang, E. (2019). Konflik Agraria Dan Disintegrasi Bangsa: Tantangan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(3), 31-48.
- Kaka, D. L. (2021). Usaha Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa Dalam Rangka Memupuk Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Pasca Kemerdekaan.
- Santoso, A. B., & Dawwas, R. (2022). Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional Dalam Menjaga Persatuan Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 20-26.
- Danugroho, A., Saputri, R. P. M., & Putra Wijaya, M. D. (2023). *Analisis Dampak Konflik Disintegrasi Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia*. *Jurnal Antroposen*, 2(2), 116-128. DOI: 10.33830/Antroposen.V2i2.5472.
- M. Kadarisman, TANTANGAN PERGURUAN TINGGI DALAM ERA PERSAINGAN GLOBAL , *Sociae Polites: BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN DOSEN FISIPOL UKI : Edisi Khusus November 2011*
- M. Kadarisman, Pemberdayaan Karyawan Dalam Birokrasi , *Sociae Polites: Vol. 10 No. 28 (2009): Juli-Desember*
- Danugroho, A. (2022). Pendidikan Dalam Kacamata Ketahanan Nasional. *Jejak Pustaka*.
- Darmodihardjo, D., & Santiaji. (1981). Pancasila. Usaha Nasional
- Jatiman, Sardjono. 1999. Disintegrasi Masyarakat Ditinjau Dari Segi Antropologi Budaya, Sosiologi Hukum Dan Psikologi Massa. Makalah Seminar. Jakarta.